**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT (PATBM) DI KABUPATEN BANDUNG BARAT**

Oleh : Heny Hadiyanti

NPM : 188010004

Program Magister Ilmu Administrasi Pascasarjana Universitas Pasundan Bandung

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya kebijakan tentang Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Desa Jayamekar yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan harus dilaksanakan oleh pemerintah tingkat provinsi sampai dengan kelurahan / desa dalam mengatasi permasalahan perlindungan anak. Masalah dalam penelitian ini bagaimana Implementasi Kebijakan tentang Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Desa Jayamekar Kabupaten Bandung Barat dan Apa sajakah faktor pendukung dan faktor penghambat Implementasi Kebijakan Tentang Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Desa Jayamekar Kabupaten Bandung Barat.

Penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Edward III berspektif *Top down*. Menurut George Edward III dalam Widodo (2010:96) terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan antara lain yaitu faktor (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi dan (4) struktur birokrasi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan studi dokumentasi.

Hasil penelitian implementasi kebijakan tentang Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Desa Jayamekar didasarkan pada proses implementasi kebijakan yang didalamnya terdiri dari a). perencanaan/perumusan kebijakan,b) pelaksanaan/implementasi kebijakan dan Faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan didasarkan pada teori Edward III terdiri dari: a). Komunikasi, b). Sumberdaya manusia, c). Disposisi dan d). Struktur Birokrasi dalam melaksanakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Desa Jayamekar Kabupaten Bandung Barat.

Kesimpulan penelitian Proses implementasi kebijakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) didasarkan pada strategi: mengkoordinasikan kebijakan PATBM yang disampaikan saat pelatihan di provinsi untuk diimplementasikan di lingkup Desa. Aspek yang penting dalam pelaksanaan implementasi kebijakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) adalah adanya arah tindakan kebijakan sampai dicapainya hasil kebijakan.

**Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Perlindungan Anak, dan PATBM**

***ABSTRACT***

*This research is motivated by the existence of a policy on Community-Based Integrated Child Protection (PATBM) in Jayamekar village issued by the central government and must be implemented by the provincial government up to the village government in overcoming child protection issues. The problem in this study is how the Implementation of the Integrated Child Protection Policy (PATBM) in Jayamekar Village, West Bandung Regency, and What are the supporting factors and inhibiting factors in the implementation of Community Based Integrated Child Protection (PATBM) in Jayamekar Village, West Bandung Regency.*

*This study uses a policy implementation model developed by Edward III with the Top-down perspective. According to George Edward III in Widodo (2010: 96), 4 factors influence the success or failure of policy implementation, including the factors (1) communication, (2) resources, (3) disposition, and (4) bureaucratic structure.*

*This research uses a qualitative research method with a descriptive approach. Data collection techniques used were observation, interviews, and documentation studies.*

*Results of research on the implementation of policies on Community-Based Integrated Child Protection (PATBM) in Jayamekar Village are based on the policy implementation process which consists of a). planning/policy formulation, b) implementation of policies and supporting factors and obstacles to the implementation of policies based on Edward III's theory consist of a). Communication, b). Human resources, c). Disposition and d). Bureaucratic Structure in implementing Community-Based Integrated Child Protection (PATBM) in Jayamekar Village, West Bandung Regency.*

*Research conclusions from the process of implementing a Community-Based Integrated Child Protection (PATBM) policy are based on a strategy: coordinating the PATBM policy that was delivered during training in the province to be implemented in the village area. An important aspect of implementing the  Community Based Integrated Child Protection (PATBM) policy is the direction of policy action until the policy results are reached.*

***Keywords: Policy Implementation, Child Protection, and PATBM Policy***

1. **Latar Belakang**

Anak adalah amanah dan juga karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus di jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi serta dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta (Sri Widoyati Soekito, 2002: 76). Hal ini sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomer 36 Tahun 1990. Langkah maju yang dilakukan Indonesia setelah meratifikasi Konvensi Hak Anak adalah mensahkan Undang – Undang No 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang – Undang No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada tahun 2014 pemerintah telah mengadakan perubahan dan penambahan terhadap Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak melalui Undang – Undang No. 35 Tahun 2014, diantaranya penambahan definisi kekerasan, perlindungan hak – hak anak dari segala bentuk kekerasan, pendidikan, pemenuhan hak anak untuk tetap bertemu dan berhubungan pribadi dengan kedua orangtuanya setelah terjadi perceraian, larangan untuk memperlakukan anak secara diskriminatif dan segala bentuk kekerasan. Menurut Kay Castelle dalam Ghufran (2015 : 24) pakar hukum internasional mengemukakan bahwa tak satu negara pun mampu melindungi hak – hak anak atau memberi mereka standar yang layak dalam kesehatan, pendidikan, pengasuhan, gizi, tempat berteduh atau perlindungan agar anak bebas dari tindak kekerasan, penelantaran dan eksploitasi.

Kedudukan dan hak anak dilihat dari perspektif yuridis sangatlah memprihatinkan. Data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Wilayah Jawa Barat tahun 2018 (Jabar dalam Angka 2018) menunjukkan bahwa jumlah penduduk Jawa Barat dari 27 kota/kabupaten di Provinsi Jawa Barat berjumlah 48.683.861 jiwa. Adapun jumlah penduduk di bawah usia 18 tahun (berdasarkan pengelompokkan usia dari BPS Jawa Barat, 2018) berjumlah 16.931.800 jiwa atau sekitar 34,7% populasi Jawa Barat adalah anak.. Hasil survey kekerasan terhadap anak yang dilakukan pemerintah Republik Indonesia bekerja sama dengan UNICEF pada tahun 2018 mengungkapkan bahwa 3 dari 5 anak perempuan mengalami kekerasan emosional, 1 dari 2 anak laki-laki mengalami kekerasan emosional, 1 dari 5 anak perempuan mengalami kekerasan fisik, 1 dari 3 anak laki – laki mengalami kekerasan fisik, dan 1 dari 11 anak perempuan mengalami kekerasan seksual, 1 dari 17 anak laki-laki mengalami kekerasan seksual, setiap 3 menit 1 anak meninggal dunia sebelum mencapai usia 5 tahun karena penyakit yang bisa dicegah, ke 3 (tiga) tertinggi di dunia sebanyak 1.8 juta anak tidak di imunisasi secara lengkap, 61% anak terlahir tanpa akte kelahiran.

Menurut Undang – Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 72 ayat 3 Peran Masyarakat dalam perlindungan anak yaitu : memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai Hak Anak dan peraturan perundang-undangan tentang Anak; memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait Perlindungan Anak; melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran hak anak; berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi social bagi Anak; melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak; menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang Anak; berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap Anak korban; dan memberikan ruang kepada Anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat.

Kebijakan Undang – Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 73 ayat 3 ini belum optimal dilakukan oleh masyarakat, sementara kasus – kasus kekerasan pada anak semakin tinggi jumlah maupun kualitasnya. Masyarakat kurang peduli saat melihat, mendengar kasus kekerasan yang terjadi di wilayahnya karena hal tersebut merupakan masalah *“domestic”.*

Edward III dan Sharkansky memberikan pengertian kebijakan Negara secara lebih fokus, sebagaimana yang dikutip oleh Islamy (2003:18) mengemukakan “Kebijakan Negara adalah apa yang ditanyakan dan dilakukan pemerintah, kebijaksanaan itu berupa sasaran atau tujuan program-program pemerintah.” Pendekatan yang diterjemahkan oleh Edward III terdapat empat variable yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu : komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Berdasarkan hal tersebut, program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) diinisiasi oleh kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia pada Tahun 2016, disetiap provinsi dipilih 2 (dua) kabupaten/kota yang akan dijadikan *pilot project* uji coba program PATBM. Untuk Propinsi Jawa Barat memilih 2 (dua) kabupaten untuk wilayah ujicoba, 2 (dua) kabupaten tersebut yaitu Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Bandung Barat. Untuk Kabupaten Bandung Barat dipilih 2 (dua) Desa yaitu Desa Tanjungwangi dan Jayamekar. Jayamekar adalah desa di kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.. Keadaan perekonomian Desa Jayam­­­­ekar masih dalam tahap perkembangan, mengingat sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai penambang pasir dan sebagian besar penduduknya juga bermata pencaharian sebagai tenaga kerja pembuat paket cobek/coet dan mutu, yang berlokasi di Gunung Halimun, yang kemudian didistribusikan ke beberapa daerah di Jawa dan Sumatera. Desa Jayamekar terpilih menjadi wilayah penelitian dikarenakan di desa tersebut sangat tinggi kasus atau masalah kesejahteraan sosialnya.

**Tabel 1.2**

**Data Masalah Kesejahteraan Sosial Anak**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Jenis Masalah** | **Jumlah** |
| 1. | Anak yatim usia 0 – 18 tahun | 816 |
| 2. | Anak piatu 0 – 18 tahun | 312 |
| 3. | Anak yatim piatu 0 – 18 tahun | 366 |
| 4. | Anak remaja; preman dan pengangguran | 4972 |
| 5. | Anak usia 7-12 tahun yang tidak sekolah di SD/sederajat | 19 |
| 6. | Anak usia 13-15 tahun yang tidak sekolah SLTP/Sederajat | 97 |
| 7. | Anak usia 15-18 tahun yang tidak sekolah di SLTA/sederajat | 196 |
| 8. | Anak yang bekerja membantu keluarga menghasilkan uang | 145 |
| 9. | Perempuan yang menjadi kepala keluarga | 648 |
| 10. | Penduduk tinggal di daerah rawan bencana kekekeringan | 618 |
| 11 | Penduduk tinggal di daerah rawan air bersih | 513 |

Sumber: Profil Desa Jayamekar Tahun 2018

Berdasarkan tabel 1.2 mengenai data masalah kesejahteraan sosial yang ada di Desa Jayamekar dapat dilihat bahwa masalah sosialnya cukup tinggi, anak remaja yang menjadi preman merupakan kasus masalah sosial yang paling tinggi ada 4972 kasus, lalu diposisi kedua masalah sosial selanjutnya ialah anak usia 0-18 tahun yang sudah menjadi yatim ada 816 anak, Untuk kasus perlindungan anak yang mana orangtua melanggar hak anak dengan menjadikan anak sebagai pekerja anak di desa Jayamekar ini ada 145 kasus, sedangkan kasus dua terbawah masalah sosial di desa Jayamekar ini meliputi, anak usia 7-12 tahun yang sudah tidak bersekolah ada 19 kasus dan penghuni bantaran sungai 4 kasus, Masalah sosial ini tentu saja bukan hanya menjadi perhatian dan tanggungjawab pemerintah saja, masyarakat juga harus mengambil perannya dalam mewujudkan lingkungan yang bebas dari masalah sosial.

Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), yaitu gerakan perlindungan anak yang dikelola oleh sekelompok orang yang tinggal di suatu wilayah (desa/kelurahan) di 34 Propinsi di Indonesia. Melalui PATBM, masyarakat diharapkan mampu mengenali, menelaah, dan mengambil inisiatif untuk mencegah dan memecahkan permasalahan kekerasan terhadap anak yang ada di lingkungannya sendiri.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis mencoba untuk melakukan studi mengenai “Implementasi Kebijakan Tentang Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Di Kabupaten Bandung Barat.

1. **Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian dan fokus penelitian di atas, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Tentang Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Desa Jayamekar Kabupaten Bandung Barat ?.
2. Apa sajakah faktor pendukung dan faktor penghambat Implementasi Kebijakan Tentang Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Desa Jayamekar Kabupaten Bandung Barat ?.
3. **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Kabupaten Bandung Barat.

Dari tujuan umum di atas, secara khusus tujuan penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

* + 1. Untuk memperoleh gambaran mengenai Proses Implementasi Kebijakan Tentang Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Desa Jayamekar.
    2. Untuk memperoleh gambaran mengenai faktor pendukung dan penghambat Implementasi Kebijakan

Tentang Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Desa Jayamekar

1. **Kerangka Berpikir**

Menelaah suatu proses kebijakan, terdapat aspek yang sangat penting yaitu implementasi kebijakan. Dunn (2000:80) mengatakan bahwa “Implementasi kebijakan, adalah pelaksanaan dan pengendalian arah tindakan kebijakan sampai dicapainya hasil kebijakan.”

Menurut Jones yang dikutip oleh Suyatna (2009:51) “implementasi kebijakan adalah proses mewujudkan program sehingga memperlihatkan hasilnya (*those activities directed toward putting a program into effect*)”

Pengertian Implementasi Kebijakan yang dikemukakan Friedrich yang dikutip oleh Nugroho D adalah sebagai berikut :

“Implementasi kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang diusulkan dalam suatu lingkungan tertentu dengan ancaman dan peluang yang ada, dimana kebijakan yang diusulkan tersebut ditunjukkan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu”.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka peneliti menarik kesimpulan bahwa implementasi kebijakan serangkaian tindakan yang diusulkan dalam suatu lingkungan untuk mewujudkan program yang telah direncanakan sehingga terlihat hasilnya.

Model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Edward III berspektif *Top down*. Menurut George Edward III dalam Widodo (2010:96) terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan antara lain yaitu faktor : (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi dan (4) struktur birokrasi. Adapun penjabaran dari ke empat faktor tersebut ialah :

1. Komunikasi

Menurut Edward III dalam Widodo (2010 :97), komunikasi diartikan sebagai “proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan”. Informasi mengenai kebijakan publik menurut Edward III dalam Widodo (2010:97) perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapakan. Menurut Edward III dalam Widodo (2010:97), komunikasi kebijakan memiliki beberapa dimensi, antara lain dimensi transmisi (*transmission*), kejelasan (*clarity*) dan konsistensi (*consistency*).

1. Dimensi transmisi menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (*implementors*) kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.
2. Dimensi kejelasan (*clarity*) menghendaki agar kebijakan yang ditrasmisikan kepada pelaksana, target grup dan pihak lain yang berkepentingan secara jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran, serta substansi dari kebijakan publik tersebut sehingga masingmasing akan mengetahui apa yang harus dipersiapkan serta dilaksanakan untuk mensukseskan kebijakan tersebut secara efektif dan efisien.
3. Dimensi konsistensi (*consistency*) diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana kebijakan, target grup dan pihak-pihak yang berkepentingan.
4. Sumberdaya

Edward III dalam Widodo (2010:98) mengemukakan bahwa faktor sumberdaya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Menurut Edward III dalam Widodo (2010:98) bahwa sumberdaya tersebut meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, dan sumberdaya peralatan dan sumberdaya kewenangan.

1. Sumberdaya Manusia

Sumberdaya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Edward III dalam Widodo (2010:98) menyatakan bahwa *“probably the most essential resources in implementing policy is staff”*. Edward III dalam Widodo (2010:98) menambahkan *“no matter how clear and consistent implementation order are and no matter accurately they are transmitted, if personnel responsible for carrying out policies lack the resources to do an effective job, implementing will not effective”*

1. Sumberdaya Anggaran

Edward III dalam Widodo (2010:100) menyatakan dalam kesimpulan studinya *“budgetary limitation, and citizen opposition limit the acquisition of adequate facilities. This is turn limit the quality of service that implementor can be provide to public”.* Menurut Edward III, terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat juga terbatas. Edward III dalam Widodo (2010:100) menyatakan bahwa *“new towns studies suggest that the limited supply of federal incentives was a major contributor to the failure of the program”.*

Menurut Edward III, terbatasnya insentif yang diberikan kepada implementor merupakan penyebab utama gagalnya pelaksanaan program. Edward III dalam Widodo (2010:101) menyimpulkan bahwa terbatasnya sumber daya anggaran akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Disamping program tidak bisa dilaksanakan dengan optimal, keterbatasan anggaran menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah.

1. Sumberdaya Peralatan

Edward III dalam Widodo (2010:102) menyatakan bahwa sumberdaya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan. Edward III dalam Widodo (2010:102) menyatakan : *Physical facilities may also be critical resources in implementation. An implementor may have sufficient staff, may understand what he supposed to do, may have authority to exercise his task, but without the necessary building, equipment, supplies and even green space implementation will not succeed.*

1. Sumberdaya Kewenangan

Sumberdaya lain yang cukup penting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan adalah kewenangan. Menurut Edward III dalam Widodo (2010:103) menyatakan bahwa: Kewenangan (*authority*) yang cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan mempengaruhi lembaga itu dalam melaksanakan suatu kebijakan. Kewenangan ini menjadi penting ketika mereka dihadapkan suatu masalah dan mengharuskan untuk segera diselesaikan dengan suatu keputusan. Oleh karena itu, Edward III dalam Widodo (2010:103), menyatakan bahwa pelaku utama kebijakan harus diberi wewenang yang cukup untuk membuat keputusan sendiri untuk melaksanakan kebijakan yang menjadi kewenangannya.

1. Disposisi

Pengertian disposisi menurut Edward III dalam Widodo (2010:104) dikatakan sebagai “kemauan, keinginan dan kecenderungan para perlaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan”. Edward III dalam Widodo (2010:104-105) mengatakan bahwa :

jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana (implementors) tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kamauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Faktor-faktor yang menjadi perhatian Edward III dalam Agustinus (2006:159-160) mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari:

1. Pengangkatan birokrasi. Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Karena itu, pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat.
2. Insentif merupakan salah-satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.
3. Struktur Birokrasi

Ripley dan Franklin dalam Winarno (2005:149-160) mengidentifikasi enam karakteristik birokrasi sebagai hasil pengamatan terhadap birokrasi di Amerika Serikat, yaitu:

1) Birokrasi diciptakan sebagai instrumen dalam menangani keperluan-keperluan publik (public affair). 2) Birokrasi merupakan institusi yang dominan dalam implementasi kebijakan publik yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dalam setiap hierarkinya. 3) Birokrasi mempunyai sejumlah tujuan yang berbeda. 4) Fungsi birokrasi berada dalam lingkungan yang kompleks dan luas. 5) Birokrasi mempunyai naluri bertahan hidup yang tinggi dengan begitu jarang ditemukan birokrasi yang mati. 6) Birokrasi bukan kekuatan yang netral dan tidak dalam kendali penuh dari pihak luar.

Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan cukup dan para pelaksana (*implementors*) mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, serta mempunyai keinginan untuk melakukannya, namun Edward III dalam Widodo (2010:106) menyatakan bahwa “implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena ketidakefisienan struktur birokrasi”. Struktur birokasi ini menurut Edward III dalam Widodo (2010:106) mencangkup aspek-aspek seperti struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi dan sebagainya.

Menurut Edwards III dalam Winarno (2005:150) terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni: ”*Standard Operational Procedure* (SOP) dan fragmentasi”. Menurut Winarno (2005:150), ”*Standard operational procedure* (SOP) merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas”. Edward III dalam Widodo (2010:107) menyatakan bahwa :

demikian pula dengan jelas tidaknya standar operasi, baik menyangkut mekanisme, system dan prosedur pelaksanaan kebijakan, pembagian tugas pokok, fungsi dan kewenangan, dan tangggung jawab diantara pelaku, dan tidak harmonisnya hubungan diantara organisasi pelaksana satu dengan yang lainnya ikut pula menentukan keberhasilan implementasi kebjakan.

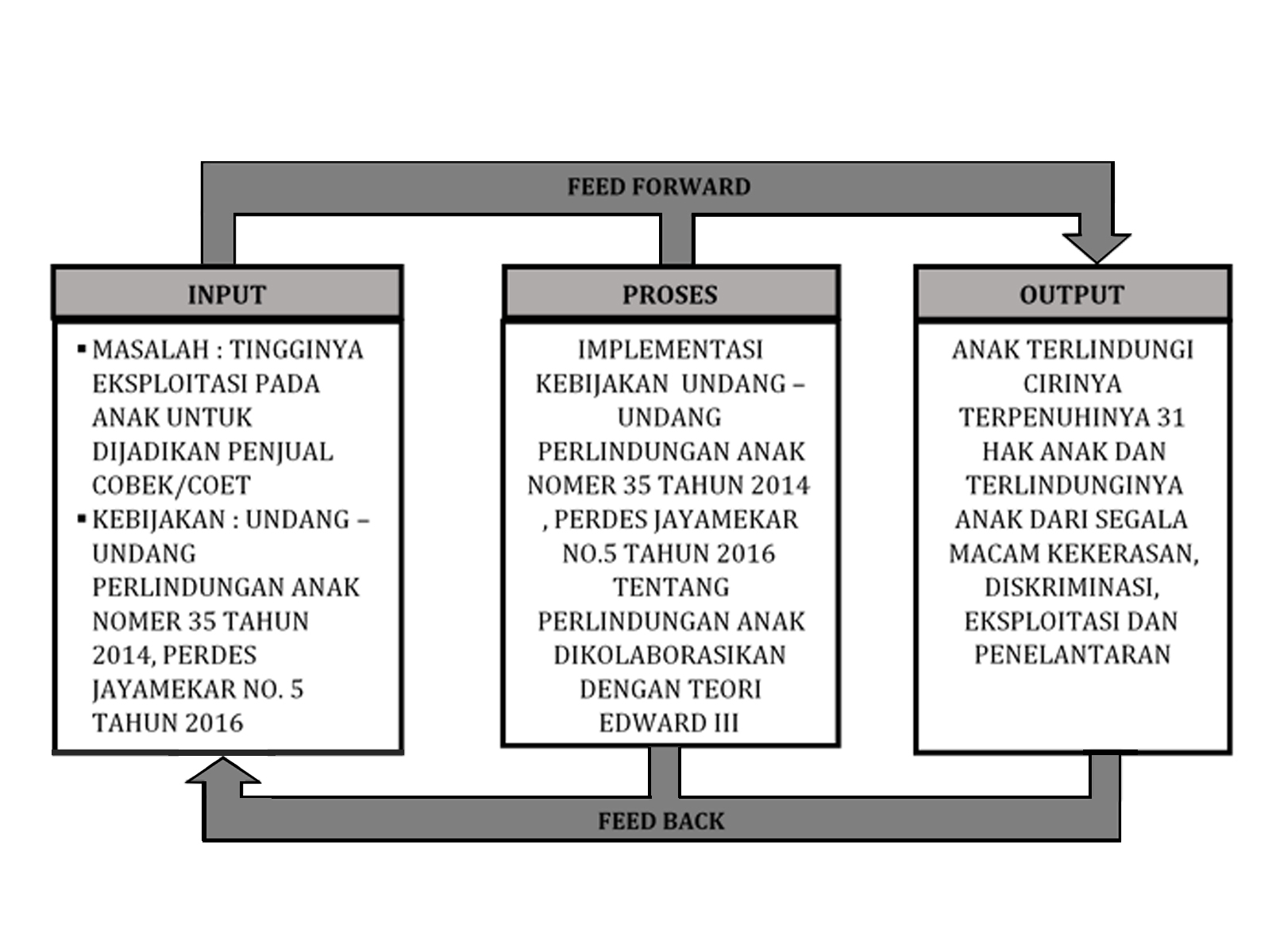
Namun, berdasakan hasil penelitian Edward III dalam Winarno (2005:152) menjelaskan bahwa:

SOP sangat mungkin dapat menjadi kendala bagi implementasi kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipetipe personil baru untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan. Dengan begitu, semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang lazim dalam suatu organisasi, semakin besar pula probabilitas SOP menghambat implementasi

Edward III dalam Winarno (2005:155) menjelaskan bahwa ”fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi” Edward III dalam Widodo (2010:106), mengatakan bahwa:

struktur birokrasi yang terfragmentasi (terpecah-pecah atau tersebar) dapat meningkatkan gagalnya komunikasi, karena kesempatan untuk instruksinya terdistorsi sangat besar. Semakin terdistorsi dalam pelaksanaan kebijakan, semakin membutuhkan koordinasi yang intensif.

Menurut modul pelatihan aktivis PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat), perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM) adalah sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak. PATBM merupakan inisiatif masyarakat sebagai ujung tombak untuk melakukan upaya – upaya pencegahan dan respon cepat terjadinya kekerasan terhadap anak dengan membangun kesadaran masyarakat agar terjadi perubahan pemahaman, sikap dan prilaku yang memberikan perlindungan kepada anak. Sebagai ujung tombak, PATBM menjadi bagian dari system perlindungan anak yang dijalankan berdasarkan kebijakan dan peraturan yang berlaku dengan menggunakan fungsi struktur kelembagaan yang sudah ada atau dibentuk baru di tingkat lokal di desa/kelurahan yang berjejaring dengan berbagai kelembagaan perlindungan anak dan pemerintah secara berjenjang.

**Kerangka Berfikir**

Masalah utama di Desa Jayamekar menyangkut perlindungan anak adalah tingginya eksploitasi anak untuk dipekerjakan sebagai penjual cobek/coet dan tingginya angka perkawinan anak. Dengan adanya kebijakan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM) para kader diharapkan dapat menurunkan angka ekploitasi dan perkawinan anak dengan memegang prinsip non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan perkembangan serta menghargai pendapat anak (partisipasi anak) juga membangun jaringan horizontal untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kasus – kasus anak.

1. **Proposisi**

Berdasarkan identifikasi masalah dan kerangka pemikiran yang telah dikemukakan diatas, maka proposisi penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Terpadu Masyarakat (PATBM) di Kabupaten Bandung Barat ditentukan oleh *Communication* (Komunikasi), *Resources* (Sumber Daya), *Dispotions or attitudes* (Sikap), dan *Bureaucratic Structure* (Struktur Birokrasi) seperti yang diharapkan oleh para sasaran kebijakan.

1. **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif karena peneliti ingin menggambarkan secara keseluruhan fakta, sifat serta hubungan antara fenomena mengenai Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis

Masyarakat (PATBM) di Desa Jayamekar Kabupaten Bandung Barat . Hal tersebut sesuai dengan tujuan dari metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang dikemukakan oleh Nazir (2005:54) “bahwa tujuan dari pendekatan deskriptif adalah memuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena-fenomena yang diselidiki”. Adapun langkah-langkah dalam melakukan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yaitu:

1. Menganalisis secara mendalam kasus dan situasi yang menjadi bahan penelitian.

2. Berusaha memahami kasus tersebut berdasarkan sudut pandang orang yang biasa menjalankan (jika berupa aktivitas) atau yang mengalaminya.

3. Mencatat keterkaitan antarperistiwa dan menganalisis faktor yang menyebabkan keduanya saling terkait.

Pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting dalam penelitian, karena pada umumnya data yang dikumpulkan akan digunakan yang mana tujuan dilakukannya penelitian ke lapangan adalah untuk mendapatkan data dan informasi yang di inginkan, maka digunakan teknik pengumpulan data untuk memperoleh data dan informasi tersebut. Menurut Lofland-lofland dalam Moleong (2014:112) bahwa “sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan yang lainnya”. Sumber data utama merupakan kata-kata dan tindakan, sehingga wawancara dan pengamatan atau observasi merupakan teknik pengumpulan data dalam penelitian menyesuaikan dengan pendapat di atas yaitu teknik observasi, wawancara, dan studi dokumentasi.

1. **Hasil Penelitian**

**Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Tentang PATBM di Desa Jayamekar**

Berdasarkan hasil wawancara kepada semua informan dan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, dapat dikatakan ada beberapa point yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dari pelaksanaan kebijakan tentang PATBM di Desa Jayamekar diantaranya yaitu **:**

**Faktor Pendukung dan Penghambat**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Variabel** | **Indikator** | **Faktor Pendukung** | **Faktor Penghambat** |
| Komunikasi | Transmisi | Materi, media, metode sudah dipersiapkan | Tidak ada |
| Kejelasan | Materi, sasaran sudah jelas | Terkadang alat/soundsystem bermasalah |
| Komitmen | Adanya peraturan desa tentang perlindungan anak, SK aktivis PATBM, dan aktivis yang kompak, semangat, ikhlas serta rela berkorban. | Adanya mutasi atau perpindahan personil yang aktif membantu mengimplementasikan kebijakan PATBM |
| Sumber Daya | Sumber Daya Manusia | Tingkat provinsi sudah ada perda perlindungan anak begitupun tingkat kota/kabupaten. Setingkat desa/kelurahan sudah dibuat juga peraturan desa (perdes) tentang perlindungan anakdan SK Aktivis PATBM | Tidak ada anggaran dan kalaupun ada desa/kelurahan yang menganggarkan nilainya sangat minim sehingga menghambat para implementator dalam mengimplementasikan kebijakan PATBM. |
| Sumber Daya Anggaran | Adanya perdes dan SK terkait PATBM sehingga ada anggaran yang diberikan melalui APBDes | Anggarannya kecil sehingga implementasi kebijakan PATBM belum maksimal dilakukan. |
| Sumber Daya Fasilitas | Semangat aktivis untuk membawa alat sebagai media sangat baik | Fasilitas yang digunakan kurang memadai seperti alat transportasi, laptop, infokus dan soundsystem/toa |
| Sumber Daya Informasi dan Kewenangan | - Tersedianya anggaran desa untuk perlindungan anak  - Adanya peraturan desa terkait perlindungan anak  - Semangat aktivis untuk memenuhi hak anak dan perlindungan anak  - Kepedulian semua pihak terkait perlindungan anak berbasis masyarakat yang kuat | Mutasi PNS yang menjadi penggerak dari implementasi kebijakan tentang PATBM, anggaran kecil dan fasilitas penunjang informasi dan kewenangan yang tidak memadai. |
| Disposisi | Komitmen | Kinerja para aktivis dengan semangat yang tinggi, bekerja dengan ikhlas tanpa pamrih dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab meskipun para pelaksana kebijakan tidak diberi upah yang setimpal dengan kinerja yang telah dilakukan | Tidak ada |
| Pembagian Tugas dan Wewenang | Semangat. Keikhlasan dan tanggungjawab para aktivis | Anggaran yang kecil dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mengimplementasikan kebijakan PATBM |
| Struktur Birokrasi | Standar Operational Procedure (SOP) | Peraturan desa tentang perlindungan anak dan SK aktivis PATBM | Anggaran yang kecil dan fasilitas yang kurang memadai dalam melaksankan kebijakan PATBM. |
| Fragmentasi | Semangat bersama lindungi anak yang kuat. | Sulit berkoordinasi apabila hp hilang, terjadi mutasi atau perpindahan pegawai ke tempat lain |

1. **Pembahasan**

**Analisis Implementasi Kebijakan Tentang PATBM di Desa Jayamekar**

Implementasi kebijakan publik dapat dilihat dari beberapa perspektif atau pendekatan. Salah satunya adalah *implementation problem approach* yang diperkenalkan oleh Edwards III. Edwards III mengajukan pendekatan masalah implementasi dengan terlebih dahulu mengemukakan dua pertanyaan pokok yakni : (1) Faktor apa yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, dan (2) Faktor apa yang menghambat implementasi kebijakan. Berdasarkan kedua pertanyaan tersebut dirumuskan empat faktor yang merupakan syarat utama keberhasilan proses implementasi yakni : komunikasi, sumberdaya, sikap birokrasi atau pelaksana dan struktur birokrasi. Empat faktor tersebut menjadi kriteria penting dalam proses implementasi kebijakan.

**H.1. Komunikasi**

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy makers*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*) (Widodo, 2011:97). Komunikasi dalam implementasi kebijakan Edward III mencakup beberapa dimensi penting yaitu :

1. Transmisi

Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali terjadi masalah dalam penyaluran komunikasi yaitu adanya salah pengertian (miskomunikasi) yang disebabkan banyaknya tingkatan birokrasi yang harus dilalui dalam proses komunikasi, sehingga apa yang diharapkan terdirtorsi di tengah jalan. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan mengenai transmisi diperoleh data yang peneliti interpretasikan bahwa transmisi implementasi kebijakan PATBM di Desa Jayamekar sesuai dengan petunjuk program implementasi kebijakan yang disampaikan oleh provinsi, kegiatannya mencakup upaya pencegahan dan respon kasus yang diawali dengan adanya kebijakan perlindungan anak tingkat desa melalui peraturan desa (perdes) dan aktivisnya di SK kan melalui SK Aktivis PATBM yang ditandatangani oleh kepala desa yang mana sasarannya adalah anak, orangtua dan masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Edward III dalam Widodo (2010:97), komunikasi kebijakan memiliki beberapa dimensi, antara lain dimensi transmisi (*transmission*), Dimensi transmisi menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (*implementors*) kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.

1. Kejelasan

Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan (street-level-bureaucrats) harus jelas dan tidak membingungkan  atau tidak ambigu/mendua. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan informan mengenai kejelasan diperoleh data yang peneliti interpretasikan kejelasan sasaran kebijakan dalam memahami kebijakan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM) sangat baik hal tersebut terlihat dari antusias sasaran kebijakan baik anak, orangtua maupun masyarakat dalam menyampaikan pertanyaan – pertanyaan berkaitan dengan implementasi kebijakan tersebut, Hal tersebut sesuai dengan pendapat Edward III dalam Widodo (2010:97), komunikasi kebijakan memiliki beberapa dimensi, antara lain kejelasan (*clarity*). Dimensi kejelasan (*clarity*) menghendaki agar kebijakan yang ditrasmisikan kepada pelaksana, target grup dan pihak lain yang berkepentingan secara jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran, serta substansi dari kebijakan publik tersebut sehingga masing-masing akan mengetahui apa yang harus dipersiapkan serta dilaksanakan untuk mensukseskan kebijakan tersebut secara efektif dan efisien.

1. Komitmen

Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan. Jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan beberapa informan mengenai komitmen diperoleh data yang peneliti interpretasikan bahwa komitmen sangat tinggi dalam mengimplementasikan kebijakan PATBM dan konsistensi implementasi kebijakan PATBM cukup baik hal tersebut dilihat dari rutinitas pelaksanaan kegiatan implementasi kebijakan, langkah yang dilakukan dan aktivis yang menyampaikan kebijakan terkait perlindungan anak. Hal tersebut sesuai dengan Edward III dalam Widodo (2010:97), komunikasi kebijakan memiliki beberapa dimensi, antara lain Dimensi konsistensi (*consistency*) diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana kebijakan, target grup dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan beberapa informan mengenai transmisi, kejelasan dan komitmen diperoleh data yang peneliti interpretasikan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh propinsi maupun desa dalam implementasi kebijakan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat berhasil dilakukan oleh implementator kebijakan (Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Provinsi Jawa Barat, Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kab. Bandung Barat, aktivis PATBM Desa Jayamekar). Hal ini sesuai dengan pendapat Agustino (2006:157); ”komunikasi merupakan salah-satu variabel penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik”. Implementasi yang efektif akan terlaksana, jika para pembuat keputusan mengetahui mengenai apa yang akan mereka kerjakan. Infromasi yang diketahui para pengambil keputusan hanya bisa didapat melalui komunikasi yang baik. Terdapat tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengkur keberhasilan variabel komunikasi. Edward III dalam Agustino (2006:157-158) mengemukakan tiga variabel tersebut yaitu:

1. Transmisi. Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali terjadi masalah dalam penyaluran komunikasi yaitu adanya salah pengertian (miskomunikasi) yang disebabkan banyaknya tingkatan birokrasi yang harus dilalui dalam proses komunikasi, sehingga apa yang diharapkan terdirtorsi di tengah jalan.
2. Kejelasan. Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan (street-level-bureaucrats) harus jelas dan tidak membingungkan  atau tidak ambigu/mendua.
3. Konsistensi. Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan. Jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.
4. **2. Sumber Daya**

Edward III dalam Widodo (2010:98) mengemukakan bahwa faktor sumberdaya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Menurut Edward III dalam Widodo (2010:98) bahwa sumberdaya tersebut meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, dan sumberdaya peralatan dan sumberdaya kewenangan.

1. Sumberdaya Manusia

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan informan mengenai sumberdaya manusia diperoleh data yang peneliti interpretasikan bahwa sumberdaya yang dimiliki dalam mengimplementasikan kebijakan PATBM di Desa Jayamekar yang menjadi implementatornya ialah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Keluarga Berencana (DP3AKB Jawa Barat), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bandung Barat dan Para aktivis PATBM Desa Jayamekar yang pada akhirnya diharapkan semua masyarakat dapat memahami kebijakan perlindungan anak dan bisa bersama-sama melindungi anak sehingga kekerasan pada anak bisa berkurang. Hal tersebut sesuai dengan pendapat bahwa sumberdaya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Edward III dalam Widodo (2010:98) menyatakan bahwa *“probably the most essential resources in implementing policy is staff”*. Edward III dalam Widodo (2010:98) menambahkan *“no matter how clear and consistent implementation order are and no matter accurately they are transmitted, if personnel responsible for carrying out policies lack the resources to do an effective job, implementing will not effective”*

1. Sumberdaya Anggaran

Dalam implementasi kebijakan, anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atau investasi atas suatu program atau kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan, sebab tanpa dukungan anggaran yang memadahi, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran. Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan study dokumentasi dengan beberapa informan mengenai sumberdaya anggaran diperoleh data yang peneliti interpretasikan bahwa sumberdaya anggaran di Desa Jayamekar Pada tahun 2016 anggaran APBDes untuk perlindungan anak sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah), meningkat di tahun 2017 sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan pada tahun 2018 meningkat pula menjadi Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah). dengan anggaran yang sedikit tidak mengurangi semangat kerja para aktivis untuk melakukan program-program pencegahan perlindungan anak. Edward III dalam Widodo (2010:100) menyatakan dalam kesimpulan studinya *“budgetary limitation, and citizen opposition limit the acquisition of adequate facilities. This is turn limit the quality of service that implementor can be provide to public”.* Menurut Edward III, terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat juga terbatas. Edward III dalam Widodo (2010:100) menyatakan bahwa *“new towns studies suggest that the limited supply of federal incentives was a major contributor to the failure of the program”.* Menurut Edward III, terbatasnya insentif yang diberikan kepada implementor merupakan penyebab utama gagalnya pelaksanaan program. Edward III dalam Widodo (2010:101) menyimpulkan bahwa terbatasnya sumber daya anggaran akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Disamping program tidak bisa dilaksanakan dengan optimal, keterbatasan anggaran menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah.

1. Sumberdaya Fasilitas / Peralatan

Fasilitas atau peralatan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Pengadaan fasilitas yang layak, seperti gedung, tanah dan peralatan perkantoran akan menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan beberapa informan mengenai sumberdaya fasilitas / peralatan diperoleh data yang peneliti interpretasikan bahwa sumberdaya fasilitas/peralatan dalam implementasi kebijakan di Desa Jayamekar mengoptimalkan sarana prasarana yang ada. Untuk kegiatan sosialisasi aktivis PATBM mendapatkan bantuan dari kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berupa infocus, laptop dan printer. Sarana prasarana yang dimiliki oleh pemerintah desa bisa dimanfaatkan oleh aktivis PATBM. Meskipun saat ini kebutuhan PATBM terkait dengan alat mobilisasi seperti motor sangat dibutuhkan karena daya jangkau ke masyarakat perbatasan desa Jayamekar cukup jauh dan jalannya kurang baik.

Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh Edward III dalam Widodo (2010:102) menyatakan bahwa sumberdaya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan. Edward III dalam Widodo (2010:102) menyatakan : *Physical facilities may also be critical resources in implementation. An implementor may have sufficient staff, may understand what he supposed to do, may have authority to exercise his task, but without the necessary building, equipment, supplies and even green space implementation will not succeed.*

1. Sumberdaya Informasi dan Kewenangan

Sumberdaya lain yang cukup penting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan adalah informasi dan kewenangan. Informasi menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan, terutama informasi yang relevan dan cukup terkait bagaimana mengimplementasikan suatu kebijakan. Sementara wewenang berperan penting terutama untuk meyakinkan dan menjamin bahwa kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan beberapa informan mengenai sumberdaya informasi dan kewenangan diperoleh data yang peneliti interpretasikan bahwa Untuk kewenangan terkait program perlindungan anak, Desa Jayamekar memberikan kewenangan penuh karena sudah mempunyai Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dan Surat Keputusan Kepala Desa Jayamekar Nomor 19/Skep/Jym/VIII/2016 tentang Susunan Pengurus Kelompok Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Desa Jayamekar Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Edward III dalam Widodo (2010:103) menyatakan bahwa: Kewenangan (*authority*) yang cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan mempengaruhi lembaga itu dalam melaksanakan suatu kebijakan. Kewenangan ini menjadi penting ketika mereka dihadapkan suatu masalah dan mengharuskan untuk segera diselesaikan dengan suatu keputusan. Oleh karena itu, Edward III dalam Widodo (2010:103), menyatakan bahwa pelaku utama kebijakan harus diberi wewenang yang cukup untuk membuat keputusan sendiri untuk melaksanakan kebijakan yang menjadi kewenangannya.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan study dokumentasi dengan beberapa informan mengenai sumberdaya diperoleh data yang peneliti interpretasikan bahwa sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, sumberdaya fasilitas/peralatan dan sumberdaya informasi dan kewenangan mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan PATBM. Hal tersebut sejalan dengan Sumber daya diposisikan sebagai input dalam organisasi sebagai suatu sistem yang mempunyai implikasi yang bersifat ekonomis dan teknologis. Secara ekonomis, sumber daya bertalian dengan biaya atau pengorbanan langsung yang dikeluarkan oleh organisasi yang merefleksikan nilai atau kegunaan potensial dalam transformasinya ke dalam output. Sedang secara teknologis, sumberdaya bertalian dengan kemampuan transformasi dari organisasi”. (Tachjan, 2006:135)

**H.3. Disposisi**

Menurut Edward III dalam Winarno (2005:142-143) mengemukakan kecenderungan-kecenderungan atau disposisi merupakan salah-satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal. Demikian sebaliknya, jika para pelaksana bersikap negatif atau menolak terhadap implementasi kebijakan karena konflik kepentingan maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yang serius. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan beberapa informan mengenai disposisi diperoleh data yang peneliti interpretasikan bahwa komitmen pelaksana kebijakan PATBM sangat tinggi hal tersebut bisa dilihat dari desa/kelurahan yang sudah dibentuk PATBM-nya dan sudah di 27 kota kabupaten di Jawa Barat memiliki PATBM yang mana dari setiap kota kabupaten sudah memiliki minimal 10 percontohan PATBM. Untuk Desa Jayamekar pelaksana komitmennya bagus, semangat yang tinggi dan bekerja dengan ikhlas dan sudah disosialisasikan ke 3 Dusun 24 RW 135 RT. Edward III dalam Widodo (2010:104-105) mengatakan bahwa :

jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana (implementors) tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kamauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Pendapat diatas sesuai dengan yang dinyatakan pata informan bahwa mereka tidak hanya mengetahui apa yang akan dilakukan akan tetapi mereka memiliki kemauan untuk melakukan kebijakan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari semangat dan kemauan mereka yang tinggi untuk mengurangi masalah perlindungan anak di Desa Jayamekar. Mereka bekerja dengan ikhlas dan semangat yang tinggi walaupun tidak di beri insentif.

Faktor-faktor yang menjadi perhatian Edward III dalam Agustinus (2006:159-160) mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari:

1. Pengangkatan birokrasi. Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Karena itu, pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat.
2. Insentif merupakan salah-satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Untuk aktivis PATBM desa Jayamekar dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan anak aktivis tidak mendapatkan insentif hal tersebut dikarenakan tidak ada anggaran untuk insentif aktivis. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.

**H.4. Struktur Birokrasi**

Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks menuntut adanya kerjasama banyak pihak. Ketika strukur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi suatu kebijakan, maka hal ini akan menyebabkan ketidakefektifan dan menghambat jalanya pelaksanaan kebijakan. Struktur birokrasi merupakan faktor yang fundamental untuk mengkaji implementasi kebijakan publik. Menurut Edwards III dalam Winarno (2005:150) terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni: ”Standard Operational Procedure (SOP) dan fragmentasi”.

1. Standard Operational Procedure (SOP)

*Standard operational procedure* (SOP) merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas”. (Winarno, 2005:150). Ukuran dasar SOP atau prosedur kerja ini biasa digunakan untuk menanggulangi keadaan-keadaan umum diberbagai sektor publik dan swasta. Dengan menggunakan SOP, para pelaksana dapat mengoptimalkan waktu yang tersedia dan dapat berfungsi untuk menyeragamkan tindakan-tindakan pejabat dalam organisasi yang kompleks dan tersebar luas, sehingga dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar dan kesamaan yang besar dalam penerapan peraturan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan beberapa informan mengenai SOP diperoleh data yang peneliti interpretasikan bahwa standar pelaksanaan prosedur implementasi kebijakan PATBM ialah disesuaikan dengan aturan yang sudah dibuat oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) yang didalamnya terdapat 6 komponen yang harus ada dalam PATBM yaitu managemen organisasi, pengelolaan SDM, pengelolaan dana, pengelolaan informasi, logistik dan mobilisasi partisipasi. Desa Jayamekar mempunyai SOP yang berpedoman pada Peraturan Desa Jayamekar No. 05 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dan Surat Keputusan Kepala Desa Jayamekar Nomor 19/Skep/Jym/VIII/2016 tentang Susunan Pengurus Kelompok Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Desa Jayamekar Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat. Hal tersebut sejalan dengan pengorganisasiannya beberapa komponen yang harus dipersiapkan terlebih dahulu dan dilaksanakan sepanjang pelaksanaan kegiatan PATBM ) (KPP PA : 2017) adalah sebagai berikut:

1. Regulasi dan manajemen
2. Pembiayaan
3. Pengelolaan Sumber Daya Manusia
4. Pengelolaan Informasi
5. Logistik dan Perlengkapan
6. Penggerakan Partisipasi Masyarakat

Hal tersebut sesuai dengan Edward III dalam Widodo (2010:107) menyatakan bahwa :

demikian pula dengan jelas tidaknya standar operasi, baik menyangkut mekanisme, system dan prosedur pelaksanaan kebijakan, pembagian tugas pokok, fungsi dan kewenangan, dan tangggung jawab diantara pelaku, dan tidak harmonisnya hubungan diantara organisasi pelaksana satu dengan yang lainnya ikut pula menentukan keberhasilan implementasi kebjakan.

Namun, berdasakan hasil penelitian Edward III dalam Winarno (2005:152) menjelaskan bahwa:

SOP sangat mungkin dapat menjadi kendala bagi implementasi kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipetipe personil baru untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan. Dengan begitu, semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang lazim dalam suatu organisasi, semakin besar pula probabilitas SOP menghambat implementasi

1. Fragmentasi

  Edward III dalam Winarno (2005:155) menjelaskan bahwa ”fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi”. Pada umumnya, semakin besar koordinasi yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, semakin berkurang kemungkinan keberhasilan program atau kebijakan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan beberapa informan mengenai fragmentasi diperoleh data yang peneliti interpretasikan bahwa dalam implementasi kebijakan PATBM baik tingkat propinsi maupun tingkat desa berkoordinasi dengan dinas/instansi/lembaga terkait dalam mengimplementasikan kebijakan PATBM. Dinas/instansi/lembaga terkait tersebut diantaranya dinas sosial, TP.PKK, Babinkamtibmas, Babinsa, DKM, dinas pendidikan, sekolah, majelis taklim, karang taruna, BPD. Cara berkoordinasinya dengan memegang kontak person yang ditunjuk oleh dinas/instansi/lembaga itu sendiri. Sejalan dengan yang disampaikan dalam modul KPPA (2017) PATBM oleh karena berorientasi kegiatan yang terpadu mulai dari promosi dan pencegahan, penanganan dan rehabilitasi maka diarahkan untuk membangun sinergitas dengan (jaringan horisontal) yang berupa lembaga desa - perangkat desa, pos pelayanan terpadu (posyandu), PKK, kader KB, PATBM desa lain, kelompok bapak-bapak, LSM dan jaringan vertikal yang berupa dukungan SKPD, rujukan layanan kesehatan primer (puskesmas), pusat pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (P2TP2A), Babinsa, sekolah, KB dan lain-lain serta model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Edward III berperspektif *Top down*. Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi kelemahan atau kegagalan seperti yang dikemukakan Budi Winarno (2005:153-154) Fragmentasi mengakibatkan pandangan-pandangan yang sempit dari banyak lembaga birokrasi. Hal ini akan menimbulkan konsekuensi pokok yang merugikan bagi keberhasilan implementasi kebijakan. Berikut hambatan-hambatan yang terjadi dalam fregmentasi birokrasi berhubungan dengan implementasi kebijakan publik : *Pertama*, tidak ada otoritas yang kuat dalam implementasi kebijakan karena terpecahnya  fungsi-fungsi tertentu ke dalam lembaga atau badan yang berbeda-beda. Di samping itu, masing-masing badan mempunyai yurisdiksi yang terbatas atas suatu bidang, maka tugas-tugas yang penting mungkin akan terlantarkan dalam berbagai agenda birokrasi yang menumpuk.*Kedua*, pandangan yang sempit dari badan yang mungkin juga akan menghambat perubahan. Jika suatu badan mempunyai fleksibilitas yang rendah dalam misi-misinya, maka badan itu akan berusaha mempertahankan esensinya dan besar kemumgkinan akan menentang kebijakan-kebijakan baru yang membutuhkan perubahan.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan study dokumentasi mengenai struktur birokrasi diperoleh data yang peneliti interpretasikan bahwa struktur birokrasi implementasi kebijakan PATBM berjalan dan terlaksana dengan baik hal tersebut tercermin dari SOP dan mitra kerjasama dan jejaring dengan lembaga/dinas/instansi terkait yang mempunyai kepedulian bersama dalam melindungi anak. Memahami struktur birokrasi merupakan faktor yang fundamental untuk mengkaji implementasi kebijakan publik. Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks menuntut adanya kerjasama banyak pihak. Ketika strukur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi suatu kebijakan, maka hal ini akan menyebabkan ketidakefektifan dan menghambat jalannya pelaksanaan kebijakan itu sendiri.

1. **Kesimpulan**

Kesimpulan penelitian disusun berdasarkan pertanyaan penelitian, hasil analisis data dan pembahasannya. Secara keseluruhan, hasil penelitianImplementasi Kebijakan Tentang Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Desa Jayamekar dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Komunikasi

Komunikasi yang dilakukan oleh propinsi maupun desa dalam implementasi kebijakan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat berhasil dilakukan oleh implementator kebijakan (Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Provinsi Jawa Barat, Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kab. Bandung Barat, aktivis PATBM Desa Jayamekar). Sasaran kebijakannya yaitu : unsur pemerintah lainnya, masyarakat, media massa, sekolah dan anak –anak. Adapun kegiatannya yaitu difokuskan pada penguatan dan perubahan norma terkait dengan perlindungan anak, kecakapan atau keterampilan menghindari kekerasan dan respon terhadap kekerasan yang berdampak pada menurunnya angka kekerasan pada anak, pernikahan usia anak dan eksploitasi anak untuk dipekerjakan menjadi pedagang “coet”. Hambatan yang dihadapi tidak semua aktivis PATBM dalam komunikasinya baik. Ada yang bisa bekerja namun kurang dalam berkomunikasi namun hal tersebut tidak menjadi hambatan yang fatal karena ada faktor pendukungnya yaitu ada beberapa orang juru komunikasi termasuk Ibu Kepala Desa yang selalu siap berkomunikasi dengan warganya.

1. Sumberdaya

Sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, sumberdaya fasilitas/peralatan dan sumberdaya informasi dan kewenangan mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan PATBM.

1. Sumberdaya manusia. Faktor penghambat SDM aktivis yang bergabung di PATBM merupakan anggota masyarakat yang bergabung pula di organisasi lain sehingga terkadang saat ada kegiatan bentrok sementara faktor pendukung jumlah aktivis bertambah seperti pada tahun 2016 saat pembentukan PATBM, aktivis yang ada dan dilatih sebanyak 10 orang dan tahun 2019 ini ada 135 aktivis dilingkup RT dan 24 aktivis lingkup RW. Untuk lingkup desa ada sekitar 24 aktivis yang bergerak untuk melakukan upaya perlindungan anak.
2. Sumberdaya anggaran didapat dari APBDes untuk tahun 2019 berjumlah Rp. 7.800.000 (*tujuh juta delapan ratus ribu rupiah*) anggaran tersebut menjadi faktor pendukung meskipun jumlahnya relative kecil.
3. Sumberdaya peralatan mempergunakan sarana prasarana yang ada di Desa Jayamekar dan khusus untuk infocus, laptop dan printer mendapat bentuan dari KPP PA.
4. Sumberdaya kewenangan para aktivis PATBM mendapat kewenangan penuh sebagai faktor pendukungnya Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dan Surat Keputusan Kepala Desa Jayamekar Nomor 19/Skep/Jym/VIII/2016 tentang Susunan Pengurus Kelompok Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Desa Jayamekar Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat.
5. Disposisi. Untuk komitmen terkait perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM) sangat baik dan sebagai faktor pendukung hal ini terlihat dari 27 kota/kabupaten di Jawa Barat sudah memiliki PATBM dan untuk Di Desa Jayamekar sudah di sosialisasikan ke 3 Dusun 24 RW dan 135 RT.

Aspek yang penting dalam pelaksanaan implementasi kebijakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) adalah adanya arah tindakan kebijakan sampai dicapainya hasil kebijakan. Arah tindakan yang akan dilakukan mencakup materi yang disampaikan, langkah – langkah yang dilakukan, pendekatan yang digunakan dan sarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan itu sendiri. Materi yang disampaikan terkait kebijakan perlindungan anak ditingkat nasional, provinsi maupun desa, kekerasan pada anak, *parenting skill* untuk orangtua, guru, masyarakat dan anak – anak. Langkah yang dilakukan oleh provinsi terlebih dahulu melakukan TOT Fasilitator PATBM, koordinasi dengan Kabupaten, pelatihan aktivis PATBM, pelaksanaan PATBM dimasyarakat dan monitoring evaluasi. Sementara untuk ditingkat desa langkah yang dilakukan yaitu merekrut aktivis, memetakan permasalahan anak, merencanakan kegiatan berdasarkan permasalahan, melaksanakan kegiatan PATBM dan monitoring evaluasi. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perseorangan dan kelompok yang dijalin dengan kekeluargaan. Sarana prasarana yang digunakan mendapat bantuan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI terkait dengan infocus, laptop dan printer. Sementara sarana prasarana lain mempergunakan sarana yang ada di Desa Jayamekar.

1. Struktur birokrasi merupakan faktor yang fundamental untuk mengkaji implementasi kebijakan publik. Standar pelaksanaan prosedur implementasi kebijakan PATBM disesuaikan dengan aturan yang sudah dibuat oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) yang didalamnya terdapat 6 komponen yang harus ada dalam PATBM yaitu managemen organisasi, pengelolaan SDM, pengelolaan dana, pengelolaan informasi, logistik dan mobilisasi partisipasi. Desa Jayamekar mempunyai SOP yang berpedoman pada Peraturan Desa Jayamekar No. 05 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dan Surat Keputusan Kepala Desa Jayamekar Nomor 19/Skep/Jym/VIII/2016 tentang Susunan Pengurus Kelompok Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Desa Jayamekar Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat.

**DAFTAR PUSTAKA**

Agustino.(2014). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*.Bandung: Alfabeta.

Agustinus,leo.(2006).*Politik dan Kebijakan Publik*.Bandung: AIPI.

Arikunto, Suharsimi.(1992). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rhineka Cipta.

Creswell.(2010). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed.* Pustaka Pelajar: Yogyakarta

Dunn,William.(2000).*Analisis Kebijakan Publik*.Yogyakarta:Hanidita Graha Widia.

Edward III,George C dan Ira Sharkansky. (1978). *The Policy Predicament-Making and Implementing Public Policy.San Fransisco*: W.H.Freeman and Company.

Ghufran, M.H.Kordi K. (2015). *Durhaka Kepada Anak*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press

Grindle,Merilee. (1980). *Politics and Policy Implementations in the Third World*. New Jersey: Princetown University Press.

Hikmat, A. d. (2004). *Participatory Research Appraisal*.Bandung: Humaniora

Hatimah, I. (2016). *Pendidikan Berbasis Masyarakat*.Bandung: Rizky Press

Hesel, Nogi S Tangkilisan.(2003). *Implementasi Kebijakan Publik: Transformasi Pemikiran*.Yogyakarta: Y.A.P.

Islamy,M.Irfan.(2001).*Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: PT.Bumi Aksara

Islamy,M.Irfan.(2007).*Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: PT.Bumi Aksara.

Kartono, Kartini. (1990). *Pengantar Metodologi Riset Sosial.* Mandar Maju: Bandung.

Keban,Yeremias T.(2008). *Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori, dan Isu Edisi Kedua*.Yogyakarta: Gaya Media.

Moleong, Lexy J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Moleong, Lexy J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif – Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Mulyana, Deddy.(2004).Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Nasution.(2003).*Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif,* Bandung: Tarsito.

Nazir,M.(2005).*Metode Penelitian*.Bogor Selatan:Ghalia Indonesia.

Nugroho,R.(2014).Public *Policy,Teori,Manajemen,Dinamika,Analisis,Konvergensi dan Kimia Kebijakan*.Elex Media Komputendo Group Gramedia: Jakarta.

Parsons,Wayne.(2014). *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktis Analisis Kebijakan*.Jakarta: PT Prenadamedia Group.

Sayekti,Pujosuwarno.(1992).*Penulisan Usulan dan Laporan Penelitian Kualitatif.*Yogyakarta:Lemlit IKIP.

Soekito, Sri Widoyati. (2002). *Anak dan Wanita dalam hukum*. Jakarta: Diadit Media

Subarsono,A.G.(2013).*Analisis Kebijakan Publik,Konsep,teori, dan Aplikasi*.Pustaka Pelajar:Yogyakarta

Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta

Suharto, E.(2014*).Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT Refika Aditama.

Sukmadinata,Nana Syaodih.(2005).Metode Penelitian Pendidikan.Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Suyatna,Uyat.(2009).*Kebijakan Publik*.Bandung:Kencana Utama.

Tohirin. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*. Jakarta: Rajawali Pers,

Wahab,Solichin Abdul.(2002). *Analisis Kebijaksanaan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*.Jakarta:Sinar Grafika.

Wibowo, Samudra.(1994). *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Raja Grafinda Persada.

Widodo,Joko.(2010). *Analisis Kebijakan Publik*.Malang:Bayumedia.

Winarno,Budi.(2005). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Winarno,Surakhmad,(1994).*Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*. Tarsito: Bandung

**Sumber dari penelitian**

Dinas Sosial Jawa Barat 2017.Bandung: Dinsos Jabar

*Jawa Barat dalam Angka*. 2018.Bandung: BPS Jabar

Hasil Survey Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Kementerian Sosial, BPS

dengan UNICEF tentang *Pravelensi Kekerasan Pada Anak* Tahun 2014.

Seminar Perlindungan Anak.Prayuana Pusat. 30 Mei 1977.

Petunjuk Pengelolaan PATBM Bagi Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota & Propinsi. 2017.

Dianawati.(2018).Peran Aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Dalam Upaya Perlindungan Anak(Studi Kasus di Desa Jayamekar Kecamatan Padalarang Kab.Bandung Barat). Tesis Magister PLS IKIP Siliwangi Bandung: Tidak diterbitkan.

Mahartiwi, Shelma Janu dan Ari Subowo(2018). *Implementasi Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindakan Kekerasan Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Semarang (Dalam Fasilitasi Perlindungan Perempuan Dari Tindakan Kekerasan)*. Jurnal Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Volume 7 No.2 Tahun 2018.

Sabatier,Paul. (1986). *Top Down and Bottom Up Approaches To Implementation Research*. Jurnal of Public Policy 6,(Jan), hal.21-48.

**Lain-lain**

Profil Desa Jayamekar Tahun 2018

Laporan Tahunan Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat Tahun 2017

Perda Provinsi Jawa Barat No 5 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Anak

Konvensi Hak Anak

Laporan Tahunan LPA Jawa Barat Tahun 2017

Modul Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No. 5 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Daerah Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2015

Peraturan Desa Jayamekar Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak